



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

**Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2021**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		
							Jumlah	%	Jumlah	% progress	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	959,213,000	1,234,544,992	128.70%	70.00%	34,424,595,237.09	88.86%	34,424,595,237.09	126.94%	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal atas saldo temuan terhitung sampai dengan 31 Desember 2021
		2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	5,551,495,500	9,360,196,534	168.61%	81	84.52	104.35%	84.52	104.35%	Laporan Hasil PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama belum diterima. Namun demikian, berdasarkan Hasil LKE PMPRB Ditjen Bimas Islam diperoleh nilai pada aspek pemenuhan sebesar 89,72, dengan tambahan nilai pada aspek reformasi sebesar 81,02.
		3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	3,882,767,000	4,997,274,387	128.70%	79	75.62	95.72%	75.62	95.72%	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Inspektorat Jenderal Nomor R-1354.9/IJ/PS.01.4/12/2021 tanggal 01 Desember 2021
		4 Nilai Maturitas SPIP	512,188,500	659,206,816	128.70%	3.40	2.844	83.65%	2.844	83.65%	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LHE SPIP) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Inspektorat Jenderal Nomor R-1169/IJ/PS.01.4/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021
		5 Indeks Profesionalitas ASN	991,518,178,000	984,273,301,824	99.27%	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Pengisian instrumen survei belum dilakukan oleh seluruh pegawai.
2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	135,000,000,000	188,092,434,377	139.33%	1:4	1 : 3.5	87.50%	1 : 3.5	87.50%	- Sejumlah 5.262 Penyuluh Agama Islam PNS dan 45.000 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 50.262 penyuluh melakukan pembinaan terhadap 177.096 kelompok sasaran secara berkala. Data jumlah kelompok sasaran meningkat dari sebelumnya sejumlah 150.478 kelompok sasaran. - Upaya peningkatan jumlah kelompok sasaran ini terjadi melalui program optimalisasi penggunaan media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang mampu menjangkau pengguna media sosial dengan berbagai konten menarik. Sasaran media sosial menjadi sasaran penyuluhan yang penting diperhatikan untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, sejumlah 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Keberadaan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia mampu mengubah pola perilaku masyarakat baik budaya, etika, dan norma. Penyuluh Agama Islam perlu melakukan pencegahan terhadap kerawanan tersebut, yang dilakukan dengan menyediakan sumber rujukan berupa materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang disajikan dalam konten-konten menarik seperti video pendek dan flyer. - Optimalisasi peran penyuluh agama Islam selama tahun 2021 dilakukan dengan: (1) peningkatan kompetensi PAIF dan PAH melalui pembinaan penyuluh, kerjasama internal antar Direktorat, dan eksternal dengan Kementerian terkait; (2) penguatan peningkatan kinerja penyuluh; (3) penguatan regulasi penyuluh agama; (4) penguatan basis data penyuluh agama Islam; (5) upaya peningkatan honorarium bagi Penyuluh Agama Islam; dan (6) pemeliharaan kerjasama lintas kementerian berbentuk MoU atau Nota Kesepahaman.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>
Token : 9Ezftx

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		
							Jumlah	%	Jumlah	% progress	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2 Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	2,988,746,125	4,164,152,107	139.33%	100.00%	99.54%	99.54%	99.54%	99.54%	- Frekuensi penyuluhan yang ditetapkan untuk Penyuluh PNS minimal 4 kali dalam sepekan dan Penyuluh Non PNS minimal 2 kali dalam sepekan. Berdasarkan Hasil Sensus Pemetaan dan Kinerja Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS Tahun 2020, terdapat 24.497 penyuluh yang menyuluh 2 KS; 8.499 penyuluh menyuluh 3 KS; 6.499 penyuluh menyuluh 4 KS; 9.999 penyuluh menyuluh lebih dari 4 KS. Frekuensi penyuluhan diasumsikan 1 KS disuluh oleh penyuluh sebanyak 1 kali per pekan, dengan lingkup 8 (delapan) tugas kebid'asIslaman, yaitu penyuluhan terkait: (1) pengentasan buta huruf Alquran; (2) keluarga sakinah; (3) pengelolaan zakat; (4) pemberdayaan wakaf; (5) produk halal; (6) kerukunan umat beragama; (7) radikalisme dan aliran sempalan; dan (8) NAPZA dan HIV/AIDS. - Pada masa pandemi Covid 19, partisipasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 dan Bencana Alam, meliputi: sosialisasi pencegahan Covid-19, pengurusan jenazah pasien Covid-19, membantu ketahanan pangan umat pada masa pandemi, melaksanakan penyuluhan secara daring (<i>online</i>), pembagian masker gratis, dan lain-lain. - Penyuluh Agama Islam juga berpartisipasi dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme, di antaranya: dengan melakukan pembinaan dan bimbingan keagamaan di lembaga pemasyarakatan terutama bagi napiter, bersinergi dengan BNPT dalam melakukan penyuluhan, menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama dalam penyuluhan, dan sebagainya. - Peran Penyuluh Agama Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat meliputi penyuluhan zakat dan wakaf, manajemen keuangan keluarga, bersinergi dengan BAZNAS dalam membangun kesadaran menunaikan zakat dan memberdayakan umat, dan semacamnya. - Penyuluh Agama Islam juga berperan dalam rutinitasnya membina umat, seperti mengajar baca tulis Al-Qur'an, mengajar tahsin dan tahfizh, mengajar anak-anak jalanan, melaksanakan dakwah dan kegiatan sosial semacam khitanan massal, dan sebagainya. - Penyuluh Agama Islam Non PNS sejumlah 45.000 penyuluh dalam menjalankan tugas strategis melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan pendekatan bahasa agama, menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga aqidah, dan penjaga akhlak masyarakat, hingga saat ini hanya menerima honorarium satu juta rupiah yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan minimal dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Ditjen Bimas Islam mengusulkan honorarium dapat ditingkatkan sesuai standar Upah Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota agar peran strategisnya dapat optimal, dan coverage maupun frekuensi penyuluhannya dapat ditingkatkan pula.
3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1 Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	24,697,446,250	91,830,500,033	371.82%	35.00%	50 kasus	42.10%	50 kasus	120.29%	- Jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam s.d. triwulan IV tahun 2021 sebanyak 50 kasus/aliran teridentifikasi dengan progress sekitar 42,10%. - Program kerja atau upaya untuk mendukung capaian persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan, di antaranya adalah (1) identifikasi daerah/lokasi yang terindikasi konflik untuk setiap fase dengan menggerakkan pegawai pusat dan daerah; (2) identifikasi daerah/lokasi yang terpapar paham keagamaan bermasalah; (3) pembinaan masyarakat dan korban paham keagamaan melalui lembaga penanganan konflik yang diberi bantuan; (4) Bina Moderasi Keagamaan Islam bagi kalangan milenial; (5) pembinaan tenaga penanganan konflik melalui kegiatan pusat dan daerah; (6) koordinas lintas sektoral melalui Dialog Nasional Paham Keagamaan Islam dan Temu Konsultasi Penanganan Paham Keagamaan Islam; (7) pembinaan SDM Masjid Berbingkai Moderasi Beragama di 34 Provinsi; (8) Coaching Clinic Naskah Keagamaan Berbingkai Mdoerasi Beragama bagi Penyuluh; (9) penguatan literasi melalui Pemberian Bantuan Buku-Buku Keagamaan dan Bantuan Operasional Perpustakaan Masjid; (10) pembuatan Modul Penanganan Konflik; (11) Lokakarya Qodhaya Fiqhiyah Muashirah dan Pembahasan Masalah Syariah yang berkembang di masyarakat; (12) Temu Konsultasi Pengelola Masjid Kementerian/Lembaga; (13) penyusunan SE Pengeras Suara Masjid; (14) FGD Penilaian Buku-Buku Keagamaan; (15) Temu Konsultasi Lembaga Konsultasi Syariah; (16) pembuatan konten syariah untuk dipublikasikan di media sosial, dan (17) Temu Konsultasi Kepustakaan Islam. - Kendala dalam pencapaian kinerja persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan, antara lain: (1) belum semua penyuluh mendapat pembinaan/sosialisasi mengenai pendataan/identifikasi paham keagamaan; (2) masih perlu penyempurnaan regulasi penanganan konflik; (3) masih perlu penyempurnaan regulasi aplikasi SIDDIK; (4) Modul pembinaan SDM masjid belum tersedia sehingga pola pembinaan belum seragam; dan (5) perpustakaan masjid belum semua mendapat sosialisasi mengenai bantuan buku keagamaan.
4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1 Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	2,988,746,125	4,164,152,107	139.33%	75.00	N/A	N/A	77.32	103%	Ditjen Bimas Islam melakukan pengukuran melalui salah satu instrumen dalam Survei Potensi Pembangunan Keagamaan Umat Islam sebelum ada pengukuran secara keseluruhan untuk semua Unit Eselon I terkait oleh Badan Litbang dan Diklat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 9Ezftx

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		
							Jumlah	%	Jumlah	% progress	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1 Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	1,947,716,750	4,502,072,720	231.15%	100.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	- Konflik/aliran berpotensi konflik ditangani oleh pemerintah melalui sinergi multi-stakeholder, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, MUI, Kesbangpol, Bakorpakem, dan Kemenag. - Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebanyak 12 dari 12 kasus/aliran teridentifikasi dengan progress rata-rata sekitar 56%. Adapun sebaran berada di provinsi Aceh, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan. - Diterbitkannya Buku Modul Penanganan Konflik Keagamaan di Indonesia dengan tujuan untuk mendokumentasikan konflik-konflik paham keagamaan dan sebagai pedoman bagi penyuluh maupun tenaga LSM yang menangani konflik. Selain itu, diterbitkan juga naskah khutbah jumat yang moderat, dan digitalisasi buku keagamaan terbitan Ditjen Bimas Islam sebagai <i>tools</i> untuk membangun pemahaman masyarakat serta sebagai bentuk antisipasi sekaligus penanganan terhadap pemahaman keagamaan yang keliru di masyarakat.
6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1 Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	20,995,672,500	41,210,946,832	196.28%	93.00%	12	4.17%	5,836	106.34%	- Beberapa program kerja yang mendukung capaian layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya (1) Pemetaan dan Migrasi Kodifikasi KUA Terbaru Simkah Web; (2) Pengembangan Aplikasi Profiling User Catin Simkah Web; (3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; (4) Interkoneksi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dengan SIAK, SIMPONI, dan Portal Kemlu; (5) Pemetaan Transformasi Digital Data Nikah; (6) Implementasi Web Service Dukcapil Terbaru dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; dan (7) Uji Kelayakan Basis Data Akta Nikah - Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital belum mencakup semua layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, melainkan hanya pelayanan pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan dengan aplikasi SIMKAH Web. - Kendala persentase layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya: (1) belum semua KUA tercover jaringan; (2) belum seluruh KUA memiliki sarpras pendukung layanan digital yang memadai; (3) dukungan SDM KUA yang kompeten digital belum memadai; (4) rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan Bimas Islam; (5) banyaknya sistem informasi yang dioperasikan oleh KUA; dan (6) pemutakhiran data Dukcapil belum maksimal atau belum <i>real time</i>.
		2 Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	6,250,003,000	4,911,266,423	78.58%	40.00%	360,805	61.66%	727,117	173.70%	- Kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan pada triwulan IV sebanyak 360.805 eks kepada 295 lokus/lembaga/perorangan, meliputi: (1) Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI; (2) Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Kemenag RI; (3) Juz 'Amma Terjemah dan Transliterasi Latin Kemenag RI; (4) Surah Yaasiin Kemenag RI; serta (5) buku keagamaan yang terdiri atas 113 judul terkait kebimasislamatan. Adapun kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak atau tersedia pada triwulan IV sejumlah 585.190 eks - Sedangkan kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan sampai dengan triwulan IV sebanyak 727.117 eks kepada 2.862 lokus/lembaga/perorangan. Adapun jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak atau tersedia sampai dengan triwulan IV sejumlah 1.046.536 eks. - Kebutuhan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia relatif tinggi sedangkan kapasitas produksi UPQ hanya mampu mencetak 300.000-500.000 eksemplar per tahun. Jumlah mushaf yang dicetak ini dipandang tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan mushaf di Indonesia. - Berdasarkan data LPMQ, dari 288 penerbit mushaf yang ada di Indonesia hanya 5% yang memiliki mesin percetakan. Para penerbit berharap Pemerintah melalui UPQ dapat memfasilitasi layanan jasa percetakan mushaf Al-Quran melalui PNBP. - Revitalisasi Unit Pencetakan Al-Quran (UPQ) dengan mengoptimalkan perannya menjadi: (1) pusat pengembangan peradaban Islam Indonesia yang menerbitkan mushaf Al-Qur'an dan buku-buku keislaman; (2) pusat edukasi dan literasi; dan (3) salah satu destinasi wisata religi di Indonesia, perlu direalisasikan. UPQ dapat dibangun menjadi percetakan Mushaf al-Qur'an berkelas dunia, yang memiliki daya tarik dengan standar berkualitas internasional, dari bangunan, mesin, hingga bahan baku. Strategi pendanaan revitalisasi UPQ akan ditempuh melalui skema pendanaan yang berasal dari SBSN.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 9Ezftx

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		
							Jumlah	%	Jumlah	% progress	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		3 Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	202,920,397,500	373,675,148,933	184.15%	55.00%	1,655	28.05%	3,873	119.33%	- KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2021 difokuskan pada KUA yang memenuhi standar dari segi sarana dan prasarana KUA yaitu KUA yang sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN dan KUA yang sudah direhabilitasi. - Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas, penguatan kompetensi SDM penghulu, dan penyediaan akses layanan KUA yang memadai di masa pandemi terutama dalam pelayanan pendaftaran nikah secara online tanpa mendaftar langsung ke KUA, juga diterbitkan kartu nikah digital sebagai pengganti kartu nikah fisik. - Program kerja atau upaya untuk mendukung capaian persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan, di antaranya adalah: (1) penguatan literasi agama bagi kepenghulu; (2) peningkatan kapasitas penghulu berbasis moderasi agama; (3) koordinasi penataan jabatan fungsional penghulu; (4) penyusunan modul peningkatan kapasitas penghulu; (5) pembahasan standar pelayanan; (6) fgd pedoman digitalisasi arsip KUA; (7) penyusunan jadwal retensi arsip; (8) bimtek petugas layanan KUA; (9) penyusunan standar layanan KUA; (10) penyusunan data kelembagaan KUA; (11) bimtek layanan prima KUA; (12) pemetaan usulan jabatan pelaksana pada kantor urusan agama; (13) verifikasi dan validasi data kelembagaan KUA; (14) penyusunan KMA tentang ABK dan Anjab pada KUA; (15) supervisi, evaluasi dan pembinaan program kelembagaan KUA; (16) koordinasi dan sinkronisasi regulasi kelembagaan KUA; (17) koordinasi KUA pemekaran; (18) bimtek manajemen pengelolaan keuangan KUA; (19) bimtek pengelolaan arsip pada KUA; (20) kajian program kelembagaan KUA via virtual; (21.)bimbingan teknis peningkatan mutu layanan KUA; (22) bimtek fasilitator berkah keuangan keluarga; (23) bimtek pengelolaan jejaring lokal KUA; (24) bimtek fasilitator layanan konsultasi dan pendampingan perkawinan dan keluarga; (25) workshop moderasi beragama berbasis keluarga; (26) bimtek fasilitator membangun relasi harmonis; (27) workshop instruktur bina keluarga sakinah; (28) FGD layanan keluarga sakinah; (29) FGD penguatan instruktur keluarga sakinah; (30) FGD bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin; (31) bimtek fasilitator bimbingan perkawinan; (32) FGD bimbingan remaja usia sekolah; (33) bimtek fasilitator bimbingan remaja usia sekolah; (34) bimtek fasilitator keluarga sakinah bagi ketahanan bangsa; dan (35) penguatan program revitalisasi KUA kecamatan tahun 2021.
7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1 Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	3,872,317,000	5,878,268,614	151.80%	15.38%	2,515,520	4.42%	10,021,543	114.46%	- Beberapa program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipadsi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya: (1.) program literasi zakat wakaf; (2) program peningkatan muzaki melalui UPZ BAZNAS; (3) program pemberdayaan masyarakat melalui KUA untuk mendorong muzaki; (4) program dukungan transparansi & akuntabilitas lembaga zakat melalui audit dan akreditasi; dan (5) program dukungan digitalisasi penghimpunan zakat. -Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKSP Persentase Partisipadsi Umat dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya: (1.) berzakat kepada lembaga non resmi; (2) sulitnya mengidentifikasi muzaki; (3) minimnya pelaporan dan SDM yang mendukung pelaporan; (4) jumlah Angka Partisipasi Kerja meningkat yang tidak diiringi dengan peningkatan literasi zakat; (5) advokasi masalah zakat belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 9Ezftx

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		
							Jumlah	%	Jumlah	% progress	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2 Persentase peningkatan wakaf produktif	8,923,147,250	14,896,861,069	166.95%	7.09%	N/A	N/A	1,436	52.51%	- Program yang mendukung pencapaian IKSP persentase peningkatan wakaf produktif, di antaranya (1) program inkubasi wakaf produktif; (2) sosialisasi dan literasi mengenai wakaf produktif; (3) program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk wakaf produktif; dan (4) program peningkatan kompetensi nazhir melalui sertifikasi SKKNI wakaf. - Proses wakaf produktif sedang berjalan dengan stimulus bantuan wakaf produktif, di mana dari target 13 lokus menjadi 12 lokus karena anggaran 1 lokus dialokasikan untuk pendampingan dan biaya operasional pembinaan program wakaf produktif sebagai dampak refocusing. Berikut iadalah lokus yang mendapatkan stimulasi bantuan wakaf produktif, baik untuk jenis usaha seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan maupun UMKM: (1) Ilomangga Batudaa, Gorontalo (Yayasan Muhammadiyah); (2) Tambakrejo Jombang, Jawa Timur (Pondok Pesatren Al Muhtadi - Ien Bahrul Ulum); (3) Maguwoharjo Depok Sleman, D. I. Yogyakarta (Yayasan Darul Muttaqien Medari); (4) Dusun Kebon Jeruk Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya, Kalimantan Barat (Pondok Pesantren Al Muhajirin); (5) Batu Ampar Balikpapan Utara Balikpapan, Kalimantan Timur (Yayasan Asy-Syifa); (6) Berau Talisayan, Kalimantan Timur (Yayasan Hidayatullah Talisayan); (7) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Hasanka Karangan); (8) Kutawaru Cilacap, Jawa Tengah (Yayasan Riyadlul Muta'allimin); (9) Kabupaten Mukomuko Kota Bengkulu, Bengkulu (Yayasan Darul Amal); (10) Imbanagara Ciamis, Jawa Barat (Yayasan Lembaga Bina Anak Soleh); (11) Mundu Cirebon, Jawa Barat (DKM Masjid Al Amin); dan (12) Pekanbaru, Riau (BWI Pekanbaru). - Wakaf produktif pada tahun 2021 ini dihitung dari tanah wakaf yang digunakan secara produktif semisal KUA sejumlah 1.139 lokus, data 6 nazhir lembaga sejumlah 263 lokus, serta 21 lokus pemberdayaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Namun belum meng- <i>capture</i> tanah wakaf untuk lahan pertanian, dan selain itu. - Anggaran terkait wakaf digunakan juga untuk pembinaan manajemen ekonomi umat, bantuan operasional BWI, pengamanan aset wakaf, dan legalitas tanah wakaf, sehingga tidak seluruhnya digunakan untuk bantuan wakaf produktif. - Perlu dilakukan upaya standarisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis, dan dukungan pemerintah berupa anggaran sebagai dana stimulan bantuan wakaf produktif yang lebih masif dan memadai. - Beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya: (1) minimnya anggaran pengembangan tanah wakaf produktif; (2) inovasi konsep wakaf produktif; (3) masih belum ada pemetaan wakaf produktif; dan (4) minimnya literasi nazhir terkait wakaf produktif.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 9Ezftx

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		
							Jumlah	%	Jumlah	% progress	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3 Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	3,547,516,500	7,030,287,084	198.17%	20.00%	996,882	1.75%	7,933,612	69.68%	- Program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di antaranya: (1) peningkatan indeks literasi wakaf; (2) peningkatan partisipasi wakaf tanah dan wakaf uang pada tahun 2021; (3) terjadinya peningkatan wakif khususnya tanah wakaf; (4) penggunaan digital payment dalam berwakaf; serta (5) sosialisasi dan edukasi melalui media sosial. - Berdasarkan hasil riset Indeks Literasi Wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia disebutkan bahwa 20% masyarakat yang disurvei sudah berwakaf, namun berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa sumber, didapatkan data sejumlah 7.933.612 wakif dengan rincian sebagai berikut: (1) aplikasi siwak.kemenag.go.id = 422.938 wakif; (2) CWLS 01 = 11 wakif; (3) CWLS ritel 001= 1.041 wakif; (4) CWLS ritel 002 = 591 wakif; (5) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2020 = 100.864 wakif; (6) Wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dari laporan 92 nazhir wakaf uang= 769.688 wakif; (7) Wakaf melalui uang nasional = 6.170.000 wakif; (8) Wakaf uang di Kementerian Koperasi dan UKM = 363.706 wakif; dan (9) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2021 = 104.773 wakif dengan total pengumpulan Rp728.955.505.476. - Literasi wakaf masyarakat dan kesadaran berwakaf perlu ditingkatkan dengan edukasi wakaf yang masif dan berkelanjutan. Gerakan wakaf uang nasional yang di-launching oleh presiden RI berdampak signifikan dalam peningkatan wakif pada objek wakaf uang. - Selain itu, perlu pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga nazhir wakaf agar akuntabilitas dan profesionalitas nazhir dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola wakaf secara produktif sehingga bernilai ekonomis. Pembinaan kepada <i>stakeholders</i> wakaf berupa diskusi rutin mengenai regulasi, perizinan, transformasi digital, dan monitoring evaluasi sempat tertunda dikarenakan kondisi PPKM. Namun demikian, refocusing program Lembaga Zakat yang Dibina sebanyak dua kali berdampak pada pembinaan tidak berjalan optimal dan tidak menyeluruh kepada lembaga wakaf yang terdiri dari 5892 PPAIW KUA, 26 LKSPWU, Badan Wakaf Indonesia di pusat, 34 provinsi, dan 385 kabupaten/kota, 160 nazhir bentuk Koperasi Syariah & Baitul Mal wa Tamwil (BMT), 79 nazhir bentuk yayasan sosial, 28 nazhir lembaga yang memiliki induk pada LAZ, 7 nazhir lembaga berbasis organisasi masyarakat & komunitas, serta 10 nazhir bentuk lembaga pendidikan sekolah, perguruan tinggi dan kampus.
Rerata Capaian Sasaran										96.51%	
Rerata Capaian Kinerja Triwulan IV										101.04%	
Anggaran Triwulan			1,416,555,551,000	1,740,880,614,852	122.90%						
Total Anggaran Tahunan pada Perkin 04 Januari 2021			5,757,112,044,000		30.24%						
Total Anggaran Tahunan per Triwulan IV			5,666,222,204,000		30.72%						

Catatan:
Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani Kamaruddin Amin pada 04 Januari 2021

Jakarta, Januari 2022
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris,

Fuad Nasar



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>
Token : 9Ezftx

Matriks Pengukuran Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2021

MATRIKS PENGUKURAN
LAPORAN CAPAIAN KERAJA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi Triwulan IV		Capaian s.d. Triwulan IV		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)	Variabel (Diisi Triwulan IV dan s.d. Triwulan IV)	Pengukuran
							Jumlah	%	Jumlah	% progress			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	959,213,000	1,234,544,992	128.70%	70.00%	34,424,595,237.09	88.86%	34,424,595,237.09	126.94%	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal atas saldo temuan terhitung sampai dengan 31 Desember 2021	a. Jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan = 34.424.595.237,09 (s.d. Tahun 2021) b. Jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan = 38.740.938.628,64 (s.d. Tahun 2021)	(a / b) * 100% Realisasi Tw IV = 34.424.595.237,09 : 38.740.938.628,64 = 88,86% Realisasi s.d. Tw IV = 34.424.595.237,09 : 38.740.938.628,64 = 88,86% Capaian s.d. Tw IV = 88,86% / 70% = 126,94%
		2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	5,551,495,500	9,360,196,534	168.61%	81	84.52	104.35%	84.52	104.35%	Laporan Hasil PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama belum diterima. Namun demikian, berdasarkan Hasil LKE PMPRB Ditjen Bimas Islam diperoleh nilai pada aspek pemenuhan sebesar 89,72, dengan tambahan nilai pada aspek reformasi sebesar 81,02	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	-
		3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	3,882,767,000	4,997,274,387	128.70%	79	75.62	95.72%	75.62	95.72%	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Inspektorat Jenderal Nomor R-1354.9/IJ/PS.01.4/12/2021 tanggal 01 Desember 2021	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	-
		4 Nilai Maturitas SPIP	512,188,500	659,206,816	128.70%	3.40	2.844	83.65%	2.844	83.65%	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LHE SPIP) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Inspektorat Jenderal Nomor R-1169/IJ/PS.01.4/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	-
		5 Indeks Profesionalitas ASN	991,518,178,000	984,273,301,824	99.27%	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Pengisian instrumen survei belum dilakukan oleh seluruh pegawai.	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Negara	-
2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	135,000,000,000	188,092,434,377	139.33%	1:4	1 : 3.5	87.50%	1 : 3.5	87.50%	- Sejumlah 5.262 Penyuluh Agama Islam PNS dan 45.000 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 50.262 penyuluh melakukan pembinaan terhadap 177.096 kelompok sasaran secara berkala. Data jumlah kelompok sasaran meningkat dari sebelumnya sejumlah 150.478 kelompok sasaran. - Upaya peningkatan jumlah kelompok sasaran ini terjadi melalui program optimalisasi penggunaan media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang mampu menjangkau pengguna media sosial dengan berbagai konten menarik. Sasaran media sosial menjadi sasaran penyuluhan yang penting diperhatikan untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, sejumlah 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Keberadaan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia mampu mengubah pola perilaku masyarakat baik budaya, etika, dan norma. Penyuluh Agama Islam perlu melakukan pencegahan terhadap kerawanan tersebut, yang dilakukan dengan menyediakan sumber rujukan berupa materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang disajikan dalam konten-konten menarik seperti video pendek dan flyer. - Optimalisasi peran penyuluh agama Islam selama tahun 2021 dilakukan dengan: (1) peningkatan kompetensi PAIF dan PAH melalui pembinaan penyuluh, kerjasama internal antar Direktorat, dan eksternal dengan Kementerian terkait; (2) penguatan peningkatan kinerja penyuluh; (3) penguatan regulasi penyuluh agama; (4) penguatan basis data penyuluh agama Islam; (5) upaya peningkatan honorarium bagi Penyuluh Agama Islam; dan (6) pemeliharaan kerjasama lintas kementerian berbentuk MoU atau Nota Kesepahaman.	a. Jumlah PAI PNS = 5.262 Jumlah PAI Non PNS = 45.000 Jumlah PAI PNS dan Non PNS = 50.262 b. Jumlah Kelompok Sasaran PAI PNS = 150.479 Jumlah Kelompok Sasaran PAI Non PNS = N/A Jumlah Kelompok Sasaran PAI PNS dan Non PNS = N/A	a : b Realisasi Tw IV = 50.262 : 150.479 = 1 : 2,99 Realisasi s.d. Tw IV = 50.262 : 150.479 = 1 : 2,99 Capaian s.d. Tw IV = 2,99 / 4 *100% = 74,75%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : qhPLNu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi Triwulan IV		Capaian s.d. Triwulan IV		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)	Variabel (Diisi Triwulan IV dan s.d. Triwulan IV)	Pengukuran
							Jumlah	%	Jumlah	% progress			
							(6)	(7)	(8)	(9)			
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)					(10)	(11)	(12)
		2 Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	2,988,746,125	4,164,152,107	139.33%	100.00%	99.54%	99.54%	99.54%	99.54%	- Frekuensi penyuluhan yang ditetapkan untuk Penyuluh PNS minimal 4 kali dalam sepekan dan Penyuluh Non PNS minimal 2 kali dalam sepekan. Berdasarkan Hasil Sensus Pemetaan dan Kinerja Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS Tahun 2020, terdapat 24.497 penyuluh yang menyuluh 2 KS; 8.499 penyuluh menyuluh 3 KS; 6.499 penyuluh menyuluh 4 KS; 9.999 penyuluh menyuluh lebih dari 4 KS. Frekuensi penyuluhan diasumsikan 1 KS disuluh oleh penyuluh sebanyak 1 kali per pekan, dengan lingkup 8 (delapan) tugas kebisamislamam, yaitu penyuluhan terkait: (1) pengentasan buta huruf Alquran; (2) keluarga sakinah; (3) pengelolaan zakat; (4) pemberdayaan wakaf; (5) produk halal; (6) kerukunan umat beragama; (7) radikalisme dan aliran sesmipan; dan (8) NAPZA dan HIV/AIDS. - Pada masa pandemi Covid 19, partisipasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 dan Bencana Alam, meliputi: sosialisasi pencegahan Covid-19, pengurusan jenazah pasien Covid-19, membantu ketahanan pangan umat pada masa pandemi, melaksanakan penyuluhan secara daring (online), pembagian masker gratis, dan lain-lain. - Penyuluh Agama Islam juga berpartisipasi dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme, di antaranya: dengan melakukan pembinaan dan bimbingan keagamaan di lembaga pemasyarakatan terutama bagi napiter, bersinergi dengan BNPT dalam melakukan penyuluhan, menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama dalam penyuluhan, dan sebagainya. - Peran Penyuluh Agama Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat meliputi penyuluhan zakat dan wakaf, manajemen keuangan keluarga, bersinergi dengan BAZNAS dalam membangun kesadaran menunaikan zakat dan memberdayakan umat, dan semacamnya. - Penyuluh Agama Islam juga berperan dalam rutinitasnya membina umat, seperti mengajar baca tulis Al-Qur'an, mengajar tahsin dan tahlifz, mengajar anak-anak jalanan, melaksanakan dakwah dan kegiatan sosial semacam khitanan massal, dan sebagainya. - Penyuluh Agama Islam Non PNS sejumlah 45.000 penyuluh dalam menjalankan tugas strategis melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan pendekatan bahasa agama, menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga aqidah, dan penjaga akhlak masyarakat, hingga saat ini hanya menerima honorarium satu juta rupiah yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan minimal dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Ditjen Bimas Islam mengusulkan honorarium dapat ditingkatkan sesuai standar Upah Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota agar peran strategisnya dapat optimal, dan coverage maupun frekuensi penyuluhannya dapat ditingkatkan pula.	a. Jumlah PAI PNS = 5.262 b. Jumlah PAI Non PNS = 45.000 c. Persentase PAI memenuhi standar minimal frekuensi penyuluhan v. Persentase target = 100% x. Jumlah minimal penyuluhan per pekan = 4x/pekan untuk PAI PNS dan 2x/pekan untuk PAI Non PNS y. Persentase realisasi frekuensi penyuluhan per tahun per PAI = 136,48% (hasil hitung) z. Realisasi frekuensi penyuluhan tiap penyuluh	c= Jumlah (y>v) / (a+b) * 100% dimana y= (z / (x * 52)) * 100% x PAIF = 4x * 52 pekan * 5.262 PAI = 1.094.496 x PAH = 2x * 52 pekan * 45.000 PAH = 4.680.000 v total = 5.774.496 z total = ((2 KS/PAI/pekan * 24.497 PAI) + (3 KS/PAI/pekan * 8.499 PAI) + (4 KS/PAI/pekan * (6.499+269)) + (5 KS/PAI/pekan * 9.999 PAI)) x 52 pekan = 7.880.856 y = 7.880.856 / 5.774.496 * 100% = 136,48% v = 100% y ≥ v Ya = 49.762 PAI Tidak = 500 PAI c = 49.762 / (5.262 PAIF + 45.000 PAH) * 100% = 99,54%
3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1 Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	24,697,446,250	91,830,500,033	371.82%	35.00%	50 kasus	42.10%	50 kasus	120.29%	- Jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam s.d. triwulan IV tahun 2021 sebanyak 50 kasus/aliran teridentifikasi dengan progress sekitar 42,10%. - Program kerja atau upaya untuk mendukung capaian persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan, di antaranya adalah (1) identifikasi daerah/lokasi yang terindikasi konflik untuk setiap fase dengan menggerakkan pegawai pusat dan daerah; (2) identifikasi daerah/lokasi yang terpapar paham keagamaan bermasalah; (3) pembinaan masyarakat dan korban paham keagamaan melalui lembaga penanganan konflik yang diberi bantuan; (4) Bina Moderasi Keagamaan Islam bagi kalangan milenial; (5) pembinaan tenaga penanganan konflik melalui kegiatan pusat dan daerah; (6) koordinasi lintas sektoral melalui Dialog Nasional Paham Keagamaan Islam dan Temu Konsultasi Penanganan Paham Keagamaan Islam; (7) pembinaan SDM Masjid Berbingkai Moderasi Beragama di 34 Provinsi; (8) Coaching Clinic Naskah Keagamaan Berbingkai Mdoerasi Beragama bagi Penyuluh; (9) penguatan literasi melalui Pemberian Bantuan Buku-Buku Keagamaan dan Bantuan Operasional Perpustakaan Masjid; (10) pembuatan Modul Penanganan Konflik; (11) Lokakarya Oodhaya Fiqihyah Muashirah dan Pembahasan Masalah Syariah yang berkembang di masyarakat; (12) Temu Konsultasi Pengelola Masjid Kementerian/Lembaga; (13) penyusunan SE Pengeras Suara Masjid; (14) FGD Penilaian Buku-Buku Keagamaan; (15) Temu Konsultasi Lembaga Konsultasi Syariah; (16) pembuatan konten syariah untuk dipublikasikan di media sosial, dan (17) Temu Konsultasi Kepustakaan Islam. - Kendala dalam pencapaian kinerja persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan, antara lain: (1) belum semua penyuluh mendapat pembinaan/sosialisasi mengenai pendataan/identifikasi paham keagamaan; (2) masih perlu penyempurnaan regulasi penanganan konflik; (3) masih perlu penyempurnaan regulasi aplikasi SIDDIK; (4) Modul pembinaan SDM masjid belum tersedia sehingga pola pembinaan belum seragam; dan (5) perpustakaan masjid belum semua mendapat sosialisasi mengenai bantuan buku keagamaan.	a. Jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam = 50 kasus/aliran ditangani dengan progress rata-rata 42,10% b. Jumlah kasus konflik intra umat beragama teridentifikasi = 50 kasus/aliran (rincian ada pada kertas kerja progress penanganan dari Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah)	(a / b) * 100% Realisasi Tw IV = ((50*42,10%)/50) * 100% = 42,10% Realisasi s.d. Tw IV = ((50*42,10%)/50) * 100% = 42,10% Capaian s.d. Tw IV = 42,10% / 35% = 120,29%
4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1 Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	2,988,746,125	4,164,152,107	139.33%	75.00	N/A	N/A	77.32	103%	Ditjen Bimas Islam melakukan pengukuran melalui salah satu instrumen dalam Survei Potensi Pembanguan Keagamaan Umat Islam sebelum ada pengukuran secara keseluruhan untuk semua Unit Eselon I terkait oleh Badan Litbang dan Diikat.	Survei Potensi Pembanguan Keagamaan Umat Islam	Menggunakan salah satu instrumen dalam Survei Potensi Pembanguan Keagamaan Umat Islam yang dilakukan Ditjen Bimas Islam.
5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1 Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	1,947,716,750	4,502,072,720	231.15%	100.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	- Konflik/aliran berpotensi konflik ditangani oleh pemerintah melalui sinergi multi-stakeholder, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, MUI, Kesbangpol, Bakorpakem, dan Kemenag. - Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebanyak 12 dari 12 kasus/aliran teridentifikasi dengan progress rata-rata sekitar 56%. Adapun sebaran berada di provinsi Aceh, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan. - Diterbitkannya Buku Modul Penanganan Konflik Keagamaan di Indonesia dengan tujuan untuk mendokumentasikan konflik-konflik paham keagamaan dan sebagai pedoman bagi penyuluh maupun tenaga LSM yang menangani konflik. Selain itu, diterbitkan juga naskah khutbah jumat yang moderat, dan digitalisasi buku keagamaan terbitan Ditjen Bimas Islam sebagai tools untuk membangun pemahaman masyarakat serta sebagai bentuk antisipasi sekaligus penanganan terhadap pemahaman keagamaan yang keliru di masyarakat.	a. Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam = 12 kasus ditangani dengan progress 65% b. Jumlah kasus konflik budaya dan agama teridentifikasi = 12 kasus (rincian ada pada kertas kerja progress penanganan dari Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah)	(a / b) * 100% Realisasi Tw IV = (((12*65%)/12) * 100% = 56% Realisasi s.d. Tw IV = (((12*65%)/12) * 100% = 56% Capaian s.d. Tw IV = 65% / 100% = 65%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : qhPLNu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)	Variabel (Disisi Triwulan IV dan s.d. Triwulan IV)		Pengukuran
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV					
							Jumlah	%	Jumlah	% progress				
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1 Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	20,995,672,500	41,210,946,832	196.28%	93.00%	12	4.17%	5,836	106.34%	- Beberapa program kerja yang mendukung capaian layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya (1) Pemetaan dan Migrasi Kodifikasi KUA Terbaru Simkah Web; (2) Pengembangan Aplikasi Profiling User Catin Simkah Web; (3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; (4) Interkoneksi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dengan SIAK, SIMPONI, dan Portal Kemlu; (5) Pemetaan Transformasi Digital Data Nikah; (6) Implementasi Web Service Dukcapil Terbaru dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; dan (7) Uji Kelayakan Basis Data Akta Nikah - Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital belum mencakup semua layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, melainkan hanya pelayanan pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan dengan aplikasi SIMKAH Web. - Kendala persentase layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya: (1) belum semua KUA tercover jaringan; (2) belum seluruh KUA memiliki sarpras pendukung layanan digital yang memadai; (3) dukungan SDM KUA yang kompeten digital belum memadai; (4) rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan Bimas Islam; (5) banyaknya sistem informasi yang dioperasikan oleh KUA; dan (6) pemutakhiran data Dukcapil belum maksimal atau belum <i>real time</i> .	Tw IV a. Jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital = 12 KUA b. Jumlah KUA (aktif) = KUA aktif total - KUA pengguna aktif SIMKAH s.d Tahun 2021 = 5.901 - 5.613 = 288 KUA s.d. Tw IV a. Jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital = KUA pengguna aktif SIMKAH tahun 2020 + Tambahkan KUA pengguna aktif SIMKAH s.d. Tw IV = 5.613 + (178 + 19 + 14 + 12) = 5.836 KUA b. Jumlah KUA (aktif) = 5.901	(a / b) * 100% Realisasi Tw IV = 12 / (5.901 - 5.613) * 100% = 4,17% Realisasi s.d. Tw IV = 5.836 / 5.901 * 100% = 98,90% Capaian s.d. Tw IV = 98,90% / 93% = 106,34%	
		2 Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	6,250,003,000	4,911,266,423	78.58%	40.00%	360,805	61.66%	727,117	173.70%	- Kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan pada triwulan IV sebanyak 360.805 eks kepada 295 lokus/lembaga/perorangan, meliputi: (1) Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI; (2) Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Kemenag RI; (3) Juz 'Amma Terjemah dan Transliterasi Latin Kemenag RI; (4) Surah Yaasin Kemenag RI; serta (5) buku keagamaan yang terdiri atas 113 judul terkait keimanaslaman. Adapun kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak atau tersedia pada triwulan IV sejumlah 585.190 eks - Sedangkan kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan sampai dengan triwulan IV sebanyak 727.117 eks kepada 2.862 lokus/lembaga/perorangan. Adapun jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak atau tersedia sampai dengan triwulan IV sejumlah 1.046.536 eks. - Kebutuhan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia relatif tinggi sedangkan kapasitas produksi UPQ hanya mampu mencetak 300.000-500.000 eksemplar per tahun. Jumlah mushaf yang dicetak ini dipandang tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan mushaf di Indonesia. - Berdasarkan data LPMQ, dari 288 penerbit mushaf yang ada di Indonesia hanya 5% yang memiliki mesin percetakan. Para penerbit berharap Pemerintah melalui UPQ dapat memfasilitasi layanan jasa percetakan mushaf Al-Quran melalui PNBP. - Revitalisasi Unit Pencetakan Al-Quran (UPQ) dengan mengoptimalkan perannya menjadi: (1) pusat pengembangan peradaban Islam Indonesia yang menerbitkan mushaf Al-Qur'an dan buku-buku keislaman; (2) pusat edukasi dan literasi; dan (3) salah satu destinasi wisata religi di Indonesia, perlu direalisasikan. UPQ dapat dibangun menjadi percetakan Mushaf al-Qur'an berkelas dunia, yang memiliki daya tarik dengan standar berkualitas internasional, dari bangunan, mesin, hingga bahan baku. Strategi pendanaan revitalisasi UPQ akan ditempuh melalui skema pendanaan yang berasal dari SBSN.	Tw IV a. Jumlah kitab suci yang dicetak = Stok cetakan per 1 Okt 2021 UPQ + Cetakan Tw IV UPQ + Stok cetakan per 1 Okt 2021 Set. DJBMI = 533.190 + 52.000 + N/A = 585.190 eks Jumlah buku keagamaan yang dicetak = Stok cetakan per 1 Okt 2021 + Cetakan Tw IV = N/A + N/A = N/A eks Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak = 585.190 eks b. Jumlah kitab suci yang didistribusikan = Distribusi Tw IV via UPQ + Distribusi Tw IV via Set. DJBMI = 360.805 + N/A = 360.805 eks Jumlah buku keagamaan yang didistribusikan =N/A eks Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan = 360.805 eks c. Jumlah sasaran = (Jumlah sasaran Tw IV UPQ - 1) + Jumlah sasaran Kitab Suci Tw IV Set. DJBMI + Jumlah sasaran Buku Keagamaan Tw IV Set. DJBMI = (296-1) + N/A + N/A = 295 d. Jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi = 295 s.d. Tw IV a. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak = 1.046.536 b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan = 727.117 c. Jumlah sasaran = 2.862 d. Jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi = 2.862	$\frac{(a-b)}{(c-d)} \times 100\%$ b/a) * (pengali indeks d/c) * 100% Jika d/c = 1 maka tepat sasaran; pengali 1 Jika 1 > d/c > 1 maka tidak tepat sasaran; pengali 0,5 Realisasi Tw IV d/c = 295 / 295, pengali 1 = (360.805 / 585.190) * 1 * 100% = 61,66% Realisasi s.d. Tw IV d/c = 2.862 / 2.862, pengali 1 = (727.117 / 1.046.536) * 1 * 100% = 69,48% Capaian s.d. Tw IV = 69,48% / 40% = 173,70%	
		3 Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	202,920,397,500	373,675,148,933	184.15%	55.00%	1,655	28.05%	3,873	119.33%	- KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2021 difokuskan pada KUA yang memenuhi standar dari segi sarana dan prasarana KUA yaitu KUA yang sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN dan KUA yang sudah direhabilitasi. - Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas, penguatan kompetensi SDM penghulu, dan penyediaan akses layanan KUA yang memadai di masa pandemi terutama dalam pelayanan pendaftaran nikah secara online tanpa mendaftar langsung ke KUA, juga diterbitkan kartu nikah digital sebagai pengganti kartu nikah fisik. - Program kerja atau upaya untuk mendukung capaian persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan, di antaranya adalah: (1) penguatan literasi agama bagi kepenghulu; (2) peningkatan kapasitas penghulu berbasis moderasi agama; (3) koordinasi penataan jabatan fungsional penghulu; (4) penyusunan modul peningkatan kapasitas penghulu; (5) pembahasan standar pelayanan; (6) fgd pedoman digitalisasi arsip KUA; (7) penyusunan jadwal retensi arsip; (8) bimtek petugas layanan KUA; (9) penyusunan standar layanan KUA; (10) penyusunan data kelembagaan KUA; (11) bimtek layanan prima KUA; (12) pemetaan usulan jabatan pelaksana pada kantor urusan agama; (13) verifikasi dan validasi data kelembagaan KUA; (14) penyusunan KMA tentang ABK dan Anjab pada KUA; (15) supervisi, evaluasi dan pembinaan program kelembagaan KUA; (16) koordinasi dan sinkronisasi regulasi kelembagaan KUA; (17) koordinasi KUA pemekaran; (18) bimtek manajemen pengelolaan keuangan KUA; (19) bimtek pengelolaan arsip pada KUA; (20) kajian program kelembagaan KUA via virtual; (21) bimbingan teknis peningkatan mutu layanan KUA; (22) bimtek fasilitator berkah keuangan keluarga; (23) bimtek pengelolaan jejaring lokal KUA; (24) bimtek fasilitator layanan konsultasi dan pendampingan perkawinan dan keluarga; (25) workshop moderasi beragama berbasis keluarga; (26) bimtek fasilitator membangun relasi harmonis; (27) workshop instruktur bina keluarga sakinah; (28) FGD layanan keluarga sakinah; (29) FGD penguatan instruktur keluarga sakinah; (30) FGD bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin; (31) bimtek fasilitator bimbingan perkawinan; (32) FGD bimbingan remaja usia sekolah; (33) bimtek fasilitator bimbingan remaja usia sekolah; (34) bimtek fasilitator keluarga sakinah bagi ketahanan bangsa; dan (35) penguatan program revitalisasi KUA kecamatan tahun 2021.	Tw IV a. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan* = KUA dengan kondisi bangunan baik menurut e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA yang sudah direhabilitasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai - KUA yang memenuhi standar pelayanan s.d. Tw III = 3.873 - 2.218 = 1.655 *=disesuaikan dengan regulasi terbaru b. Jumlah KUA (aktif) = 5.901 s.d. Tw IV a. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan* = KUA dengan kondisi bangunan baik menurut e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA yang sudah direhabilitasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai = 3.873 *=disesuaikan dengan regulasi terbaru b. Jumlah KUA (aktif) = 5.901	(a / b) * 100 Realisasi Tw IV = 1.655 / 5.901 = 28,05% Realisasi s.d. Tw II = 3.873 / 5.901 = 65,63% Capaian s.d. Tw II = 65,63% / 55% = 119,33%	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : qhPLNu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi		Capaian		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)	Variabel (Diisi Triwulan IV dan s.d. Triwulan IV)	Pengukuran
							Triwulan IV		s.d. Triwulan IV				
							Jumlah	(%)	Jumlah	% progress			
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1 Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	3,872,317,000	5,878,268,614	151.80%	15.38%	2,515,520	4.42%	10,021,543	114.46%	- Beberapa program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya: (1.) program literasi zakat wakaf; (2) program peningkatan muzaki melalui UPZ BAZNAS; (3) program pemberdayaan masyarakat melalui KUA untuk mendorong muzaki; (4) program dukungan transparansi & akuntabilitas lembaga zakat melalui audit dan akreditasi; dan (5) program dukungan digitalisasi penghimpunan zakat. *-Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya: (1.) berzakat kepada lembaga non resmi; (2) sulitnya mengidentifikasi muzaki; (3) minimnya pelaporan dan SDM yang mendukung pelaporan; (4) jumlah Angka Partisipasi Kerja meningkat yang tidak diiringi dengan peningkatan literasi zakat; (5) advokasi masalah zakat belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.	Tw IV a. Persentase penduduk muslim = 86,88% (Dukcapil Kemendagri 2021) atau sekitar 236.530.000 juta jiwa b. Jumlah muzaki perseorangan = Jumlah muzaki nasional dari 63% lembaga yang melapor atau 410 dari 652 BAZNAS dan LAZ - Jumlah muzaki tahun 2020 = 10.021.543 - 7.506.023 = muzaki c. Jumlah angkatan kerja = 131.050.000 juta orang (Kadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2021 BPS) x 86,88% =113.856.240 orang s.d. Tw IV a. Persentase penduduk muslim = 86,88% (Dukcapil Kemendagri 2021) atau sekitar 236.530.000 juta jiwa b. Jumlah muzaki perseorangan = Jumlah muzaki nasional dari 63% lembaga yang melapor atau 410 dari 652 BAZNAS dan LAZ = 10.021.543 muzaki c. Jumlah angkatan kerja = 131.050.000 juta orang (Kadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2021 BPS) x 86,88% =113.856.240 orang	(b/(c*a*50%))*100% Realisasi Tw IV = 2.515.520 / (131.050.000 *86.88%*50%)) *100% = (2.515.520 / 56.928.120) *100% = 4,42% Realisasi s.d. Tw IV = 10.021.543 / (131.050.000 *86.88%*50%)) *100% = (10.021.543 / 56.928.120) *100% = 17,60% Capaian s.d. Tw IV = 17,60% / 15,38% = 114,46%
		2 Persentase peningkatan wakaf produktif	8,923,147,250	14,896,861,069	166.95%	7.09%	N/A	N/A	1,436	52.51%	- Program yang mendukung pencapaian IKSP persentase peningkatan wakaf produktif, di antaranya (1) program inkubasi wakaf produktif; (2) sosialisasi dan literasi mengenai wakaf produktif; (3) program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk wakaf produktif; dan (4) program peningkatan kompetensi nazhir melalui sertifikasi SKKNI wakaf. - Proses wakaf produktif sedang berjalan dengan stimulus bantuan wakaf produktif, di mana dari target 13 lokus menjadi 12 lokus karena anggaran 1 lokus dialokasikan untuk pendampingan dan biaya operasional pembinaan program wakaf produktif sebagai dampak refocusing. Berikut adalah lokus yang mendapatkan stimulus bantuan wakaf produktif, baik untuk jenis usaha seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan maupun UMKM: (1) Ilomangga Batudaa, Gorontalo (Yayasan Muhammadiyah); (2) Tambakrejo Jombang, Jawa Timur (Pondok Pesantren Al Mubtadi - Ien Bahrul Ulum); (3) Maguwoharjo Depok Sleman, D. I. Yogyakarta (Yayasan Darul Muttaqien Medari); (4) Dusun Kebon Jeruk Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya, Kalimantan Barat (Pondok Pesantren Al Muhajirin); (5) Batu Ampar Balikpapan Utara Balikpapan, Kalimantan Timur (Yayasan Asy-Syifa); (6) Berau Talisayan, Kalimantan Timur (Yayasan Hidayatullah Talisayan); (7) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Hasanka Karangan); (8) Kutawaru Cilacap, Jawa Tengah (Yayasan Riyadul Muta'allimin); (9) Kabupaten Mukomuko Kota Bengkulu, Bengkulu (Yayasan Darul Amal); (10) Imbanagara Ciamis, Jawa Barat (Yayasan Lembaga Bina Anak Soleh); (11) Mundu Cirebon, Jawa Barat (DKM Masjid Al Amin); dan (12) Pekanbaru, Riau (BWI Pekanbaru). - Wakaf produktif pada tahun 2021 ini dihitung dari tanah wakaf yang digunakan secara produktif semisal KUA sejumlah 1.139 lokus, data 6 nazhir lembaga sejumlah 263 lokus, serta 21 lokus pemberdayaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Namun belum meng-capture tanah wakaf untuk lahan pertanian, dan selain itu. - Anggaran terkait wakaf digunakan juga untuk pembinaan manajemen ekonomi umat, bantuan operasional BWI, pengamanan aset wakaf, dan legalitas tanah wakaf, sehingga tidak seluruhnya digunakan untuk bantuan wakaf produktif. - Perlu dilakukan upaya standarisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis, dan dukungan pemerintah berupa anggaran sebagai dana stimulan bantuan wakaf produktif yang lebih masif dan memadai. - Beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya: (1) minimnya anggaran pengembangan tanah wakaf produktif; (2) inovasi konsep wakaf produktif; (3) masih belum ada pemetaan wakaf produktif; dan (4) minimnya literasi nazhir terkait wakaf produktif.	Tw IV a. Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan = stimulus bantuan wakaf produktif + CWLS = 13 + 21 = 34 lokus b. Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis = 38.575 lokus Populasi tanah wakaf produktif (siwak.kemenag.go.id diakses 31 Desember 2021) s.d Tw IV a. Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan tahun 2021 = data 6 nazhir forum wakaf produktif + data siwak.kemenag.go.id + stimulus bantuan wakaf produktif + CWLS = 263 + 1.139 + 13 + 21 = 1.436 lokus b. Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis = 38.575 lokus Populasi tanah wakaf produktif (siwak.kemenag.go.id diakses 31 Desember 2021)	(a / b) * 100% Realisasi Tw IV = N/A Realisasi s.d. Tw IV = ((263 + 1.139 + 13 +21 lokus) / 38.575) * 100% = 3,72% Capaian s.d. Tw IV = ((1.436 / 38.575) * 100%) / 7,09% = 3,72 % / 7,09% = 52,51%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : qhPLNu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Target Tahun 2021	Realisasi Triwulan IV		Capaian s.d. Triwulan IV		Keterangan (Program, Progress, dan Kendala)	Variabel (Disisi Triwulan IV dan s.d. Triwulan IV)	Pengukuran
							Jumlah	%	Jumlah	% progress			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
		3 Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	3,547,516,500	7,030,287,084	198.17%	20.00%	996,882	1.75%	7,933,612	69.68%	- Program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di antaranya: (1) peningkatan indeks literasi wakaf; (2) peningkatan partisipasi wakaf tanah dan wakaf uang pada tahun 2021; (3) terjadinya peningkatan wakif khususnya tanah wakaf; (4) penggunaan digital payment dalam berwakaf; serta (5) sosialisasi dan edukasi melalui media sosial. - Berdasarkan hasil riset Indeks Literasi Wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia disebutkan bahwa 20% masyarakat yang disurvei sudah berwakaf, namun berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa sumber, didapatkan data sejumlah 7.933.612 wakif dengan rincian sebagai berikut: (1) aplikasi siwak.kemenag.go.id = 422.938 wakif; (2) CWLS 01 = 11 wakif; (3) CWLS ritel 001 = 1.041 wakif; (4) CWLS ritel 002 = 591 wakif; (5) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2020 = 100.864 wakif; (6) Wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dari laporan 92 nazhir wakaf uang= 769.688 wakif; (7) Wakaf melalui uang nasional = 6.170.000 wakif; (8) Wakaf uang di Kementerian Koperasi dan UKM = 363.706 wakif; dan (9) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2021 = 104.773 wakif dengan total pengumpulan Rp728.955.505.476. - Literasi wakaf masyarakat dan kesadaran berwakaf perlu ditingkatkan dengan edukasi wakaf yang masif dan berkelanjutan. Gerakan wakaf uang nasional yang di-launching oleh presiden RI berdampak signifikan dalam peningkatan wakif pada objek wakaf uang. - Selain itu, perlu pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga nazhir wakaf agar akuntabilitas dan profesionalitas nazhir dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola wakaf secara produktif sehingga bernilai ekonomis. Pembinaan kepada stakeholders wakaf berupa diskusi rutin mengenai regulasi, perizinan, transformasi digital, dan monitoring evaluasi sempat tertunda dikarenakan kondisi PPKM. Namun demikian, refocusing program Lembaga Zakat yang Dibina sebanyak dua kali berdampak pada pembinaan tidak berjalan optimal dan tidak menyeluruh kepada lembaga wakaf yang terdiri dari 5892 PPAIW KUA, 26 LKSPWU, Badan Wakaf Indonesia di pusat, 34 provinsi, dan 385 kabupaten/kota, 160 nazhir bentuk Koperasi Syariah & Baitul Mal wa Tamwil (BMT), 79 nazhir bentuk yayasan sosial, 28 nazhir lembaga yang memiliki induk pada LAZ, 7 nazhir lembaga berbasis organisasi masyarakat & komunitas, serta 10 nazhir bentuk lembaga pendidikan sekolah, perguruan tinggi dan kampus.	Tw IV a. Jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf = Jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf sampai dengan Tw IV - Jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf sampai dengan Tahun 2020 = 7.933.612 - 6.936.730 = 996.882 wakif b. Jumlah umat Islam = jumlah umat Islam (jumlah angkatan kerja - Islam) =131,05 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2021 BPS) x 86,88% x 50% = 56.928.120 orang s.d. Tw IV a. Jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf Tahun 2021 = 7.933.612 wakif b. Jumlah umat Islam (jumlah angkatan kerja - Islam) = 139,81 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2021 BPS) x 87,18% x 50% = 56.928.120 orang	(a / b) * 100% Realisasi Tw IV = (996.882 / 56.928.120) *100% = 1,75% Realisasi s.d. Tw IV = (7.933.612 / 56.928.120) *100% = 13,94% Capaian s.d. Tw IV = (7.933.612 / 56.928.120) *100% / 20% = 13,94% / 20% = 69,68%
Rerata Capaian Sasaran										96.51%			
Rerata Capaian Kinerja Triwulan IV										101.04%			
Anggaran Triwulan			1,416,555,551,000	1,740,880,614,852	122.90%								
Total Anggaran Tahunan pada Perkin 04 Januari 2021			5,757,112,044,000		30.24%								
Total Anggaran Tahunan per Triwulan IV			5,666,222,204,000		30.72%								

Catatan:
Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani Kamaruddin Amin pada 04 Januari 2021

Jakarta, Januari 2022
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : qhPLNu

**Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2021**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamaruddin Amin

Jabatan : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yaqut Cholil Qoumas

Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

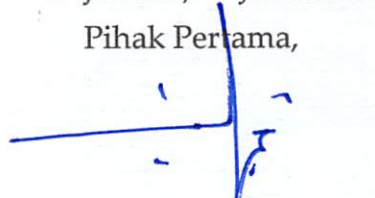
Pihak Kedua,



Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama,



Kamaruddin Amin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	70,00
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	81,00
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79,00
		d. Nilai Maturitas SPIP	3,40
		e. Indeks Profesionalitas ASN	75,00
2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	a. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama (Islam)	1 : 4
		b. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	100,00
3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	35,00
4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	75,00
5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00
6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	a. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	93,00
		b. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	40,00
		c. Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	55,00
7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan	a. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	15,38
		b. Persentase peningkatan wakaf produktif	7,09
		c. Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	20,00

Program dan Kegiatan

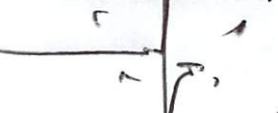
Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen	Rp 4.011.020.466.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 4.011.020.466.000
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp 1.746.091.578.000
a. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp 811.530.856.000
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp 69.299.311.000
c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp 698.671.414.000
d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp 166.589.997.000
Jumlah Seluruh	Rp 5.757.112.044.000

Menteri Agama,


Yaquut Cholil Qoumas

Jakarta, 4 Januari 2021
Direktur Jenderal,


Kamaruddin Amin